



# Banyak Warga Tak Terdaftar Bantuan

## ■ DPRD Kota Yogya Konsultasi ke Kemensos Soal Validitas DTSEN

**YOGYA, TRIBUN** - Validitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kerap kali memicu persoalan di daerah, tak terkecuali di Kota Yogyakarta. Hingga kini tercatat masih banyak warga yang secara riil membutuhkan bantuan, justru tidak terakomodasi lantaran terbelat pembagian desil dari pemerintah pusat.

Merespons sengkaret data kemiskinan tersebut, jajaran legislator dari Komisi D DPRD Kota Yogyakarta menyanggah Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) di Jakarta, Serin (21/6).

Dalam pertemuan lintas instansi untuk mencari jalan keluar atas dinamika kewilayahan terkait DTSEN itu, para anggota dewan ditemui langsung oleh Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono.

Agus Jabo pun mengungkapkan, bahwa pembagian

desil memang dapat disesuaikan agar selaras dengan kondisi riil perekonomian di tiap-tiap daerah. Mengingat DTSEN saat ini masih berada dalam masa transisi, daerah diberikan ruang tersendiri untuk membuat payung hukum yang bersifat lokal.

"Memang kemudian ada dua konsep, satu yang pusat, satu yang disesuaikan dengan tingkat sosial ekonomi di wilayah masing-masing. Dan itu bisa menggunakan payung hukum atau peraturan daerah, karena DTSEN ini masih dalam transisi," ujarnya.

Dia menjelaskan, selama proses verifikasi nasional berjalan, Kemensos mendorong pemerintah daerah untuk bergerak cepat menyusun peraturan kepala daerah. Aturan tersebut, nantinya bakal mengatur kriteria penerima manfaat secara lebih spesifik dan kontekstual sesuai kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

"Kami sarankan untuk (membahasnya) bersama dengan teman-teman BPS (Badan Pusat Statistik) dan Dinas Sosial dalam penyusunan peraturan tersebut," ungkapnya.

**Dampak langsung**  
 Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Triyono Hari Kumoro, membenarkan, persoalan data ini berdampak langsung pada penyaluran program, salah satunya Jaminan Pendidikan

Daerah (JPD) yang ditanggarkan melalui APBD Kota Yogyakarta.

Saat ini, regulasi JPD wajib mengacu pada DTSEN, di mana bantuan hanya menyasar masyarakat yang berada pada desil 1 hingga 5, sehingga memicu ketimpangan baru. "Komisi D bersepakat untuk kemudian mengadakan konsultasi ke kementerian supaya mendapatkan penjelasan, informasi yang valid. Jadi, nanti bisa kita aplikasikan di lapangan ketika menghadapi berbagai persoalan yang ada," paparnya.

"Sekarang di lapangan masih sering dijumpai kasus, warga yang sangat membutuhkan bantuan pendidikan, tetapi data mereka tercatat di atas desil 5. Akibatnya, mereka tereliminasi dari sistem sebagai penerima JPD," imbuh Kumoro.

Senada, Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Darini, menggarisbawahi pentingnya mengetahui batas kewenangan pemerintah daerah dalam menuliskan kebijakan. Aduan dan masukan dari warga masyarakat Kota Yogyakarta yang merasa berhak namun tidak terdata, dewasa ini terus mengalir ke dewan.

Dari hasil konsultasi ini, kata Darini, ada angin segar bagi warga yang datanya belum sesuai, karena Pemerintah Kota Yogyakarta diketahui bisa melakukan mekanisme pengusulan ulang.

### DATA RANCU

- Validitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kerap kali memicu persoalan di daerah, tak terkecuali di Kota Yogyakarta.
- Hingga kini tercatat masih banyak warga yang secara riil membutuhkan bantuan, justru tidak terakomodasi.
- Pemicunya lantaran terbelat pembagian desil dari pemerintah pusat.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat DPRD Kota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Juli 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005